

ABSTRAK

Oleh : Vani Wirawan¹

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai salah satu perwujudan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk sertifikasi tanah secara nasional sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Namun dalam kenyataannya proses pelaksanaan kegiatan tersebut ada di beberapa wilayah yang telah terdapat dalam kategori tindak pidana korupsi yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan *pertama* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam beberapa pelaksanaan PTSL, *kedua* mengevaluasi sudut pandang penegakan hukum tindak pidana korupsi PTSL yang bersifat *primum remedium* berdasarkan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik, *ketiga* mengembangkan konsep ideal yang ditempuh pemerintah sebagai upaya program anti korupsi dalam pelaksanaan program-program strategis nasional pertanahan khususnya PTSL di masa mendatang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi didalam beberapa pelaksanaan PTSL, dikarenakan faktor langsung: (1) Kesempatan, dalam artian peluang yang cukup dalam melakukan tindak pidana korupsi PTSL; (2) Kesengajaan dan/atau keinginan, dalam artian didorong karena kebutuhan

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

dalam pelaksanaan PTSL; dan (3) Kurangnya honorarium/gaji para panitia pelaksana PTSL, faktor tidak langsung: (1) Kurangnya informasi yang detail terhadap masyarakat terkait aturan dan petunjuk teknis PTSL; (2) Kurangnya informasi dasar hukum tentang pembiayaan permohonan PTSL; dan (3) Lemahnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak BPN serta Pemerintah Daerah. Penegakan hukum tindak pidana korupsi PTSL yang bersifat *primum remedium* berdasarkan prinsip AUPB mempunyai sudut pandang kesesuaian dan terpenuhinya maksud dari keseluruhan asas yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Konsep ideal dimasa mendatang yang seharusnya ditempuh pemerintah sebagai upaya program anti korupsi (*fraud control plan*) terhadap program strategis nasional pertanahan khususnya PTSL yakni dibutuhkan konsep ideal yang terdiri dari konsep eksternal dan konsep internal. Beberapa konsep ideal tersebut yang dibutuhkan dalam upaya program anti korupsi (*fraud control plan*) terhadap program strategis nasional pertanahan khususnya PTSL dimasa mendatang, diperlukan juga langkah pemerintah yakni melakukan evaluasi, pembaharuan, dan/atau perubahan terhadap ketentuan SKB 3 Menteri terkhususnya dalam substansi Diktum Ketujuh.

Kata kunci : Kajian Kritis, Tindak Pidana Korupsi, PTSL.

ABSTRACT

By : Vani Wirawan²

The Complete Systematic Land Registration Program as one of the embodiments of government innovation through the ATR/BPN Ministry for national land certification as a manifestation of the implementation of government obligations to ensure legal certainty and protection of community land ownership. However, in reality, the process of carrying out these activities is in several areas that are already in the category of corruption that have been decided and have permanent legal force. This study aims firstly to identify the factors that cause corruption in some PTSL implementations, secondly to evaluate the perspective of law enforcement of PTSL corruption that is *primum remedium* based on the principles of Good Governance General Principle, third, to develop the ideal concept adopted by the government as anti-corruption program efforts in the implementation of national strategic land programs, especially PTSL in the future. This research is analytical descriptive with normative law research. The research approach method used in writing this law is the Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. The results of the discussion and research can be concluded that the causes of the occurrence of criminal acts of corruption in several PTSL implementation, due to direct factors: (1) Opportunities, in terms of sufficient opportunities in committing criminal acts of corruption of PTSL; (2) Intentions and/or desires, in the sense of being encouraged because of the need in implementing PTSL; and (3) Lack of honorarium/salary of PTSL implementing committees, indirect factors: (1) Lack of detailed information to the public regarding PTSL rules and technical guidelines; (2) Lack of basic legal information about financing PTSL applications;

² Master of Law at the University of Muhammadiyah Yogyakarta

and (3) Weak socialization and supervision from BPN and the Regional Government. The law enforcement of PTSL corruption which is *primum remedium* based on the AUPB principle has the viewpoint of conformity and the fulfillment of the intentions of the entire principles contained in Article 3 of Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism, and Article 10 paragraph (1) of Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration. The ideal concept in the future that should be taken by the government as an anti-corruption program (fraud control plan) towards the national strategic land program, especially PTSL, is the need for an ideal concept consisting of external and internal concepts. Some of the ideal concepts that are needed in the efforts of anti-corruption programs (fraud control plan) on national strategic land programs, especially PTSL in the future, are also needed by government steps to conduct evaluations, updates, and/or changes to the provisions of the Joint Ministerial Decree 3 especially in the substance of the Seventh Dictum.

Keywords : Critical Study, Corruption Crime, PTSL.